



# RKT

RENCANA KERJA TAHUNAN

DINAS SOSIAL  
TAHUN 2025

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja Tahunan PD Dinas Sosial tahun 2025** dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahunan PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai setiap tahun dan kurun waktu lima tahun, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurna dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA TAHUNAN PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, Agustus 2024

  
Plt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
  
Drs. Yuliandris Suherdiman  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19680708 199403 1 013

## Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
<b>BAB II    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan	8
2.3 Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah	10
<b>BAB III    PENUTUP</b>	19

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada PMKS secara komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting untuk mencapai masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan penanganan sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2024 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan. Rencana Kerja Tahunan OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
20. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
21. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) ;
22. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang

- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
  33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah ;
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  35. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD setra tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua KEPMENDAGRI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang ditentukan.
4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemensos	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019	1. Sumber data yang akan dijadikan basis data belum tersedia dengan mudah dan cepat 2. Koordinasi dengan instansi penyedia data belum berjalan dengan baik, karena adanya pembatasan kewenangan	1. Belum terintegrasinya aplikasi pengolah dan penyedia data PMKS dengan basis data kemiskinan 2. Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan basis data kemiskinan dan PMKS	Memberikan peluang kerjasama dengan instansi penyedia data untuk meningkatkan kualitas basis data dalam mendukung pencapaian sasaran
2	Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pendamping dan pembimbing LKS 2. Kerjasama dengan BBPPKS dalam pengembangan kapasitas SDM belum berjalan dengan baik		Menjadi faktor pemicu dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur diperoleh informasi tabel sebagai berikut :

Tabel ;  
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara  
berdasarkan Sasaran Renstra Dinsos Prov Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinsos Prov Kaltim	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	Dimensi kualitas hidup yang sangat luas sehingga perlu diturunkan secara lebih khusus untuk memudahkan penanganan	Tidak adanya informasi yang tegas tentang berapa kontribusi yang diharapkan dari Kabupaten/Kota untuk mencapai target sasaran tersebut	
2	Meningkatkan potensi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Upaya peningkatan potensi sosial PMKS masih dipahami dengan sangat sederhana dan terbatas	PMKS sangat mengharapkan upaya pemberdayaan yang bersifat instan, bukan pemberdayaan yang sebenarnya merupakan proses yang cenderung Panjang	Kebijakan Kepala Daerah untuk pemberdayaan masyarakat sangat tinggi
3	Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSKS terutama TKSM yang jumlahnya paling banyak, kondisinya banyak yang sdh tidak aktif lagi</li> <li>2. TKSM yang ada sudah banyak yang memasuki usia lanjut</li> <li>3. PSKS yang masih potensial jumlahnya sangat terbatas dan sebarannya cukup jauh</li> </ol>	Pola pembinaan dan pemberian wewenang yang kurang jelas terutama bagi TKSM	Adanya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, memerlukan partisipasi aktif dari PSKS
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur	1. Penempatan SDM Aparatur yang tidak sesuai dengan disiplin	Kebijakan Kepala Daerah untuk meningkatkan

		2. Banyaknya aturan penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali membingungkan dalam pelaksanaannya 3. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja SKPD	ilmu yang dikuasainya 2. Tidak tersedianya petunjuk teknis operasional yang jelas dan mudah dioperasikan	kualitas akuntabilitas kinerja dengan memberikan <i>reward and punishment</i> yang jelas
--	--	---	---	--

## 2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan\_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2021 (target)	2021 (realisasi)	2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar		Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00%
		Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Presentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	Persen	94,33%	94,23%	97,63%	95,50%	96,66%	97,83%	99,00%	99,00%
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai	74,76	83,48	83,48	83,50	81,00	82,00	84,00	84,00

### 2.3. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam rencana kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2024. Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 :

**PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>					
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	2 Dokumen	450.000.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	6 Laporan	50.000.000,-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	8 Laporan	150.000.000,-
4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	50.000.000,-
5	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Data	250.000.000,-
6	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Berita Acara	50.000.000,-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1106 orang/ Bulan	10.770.493.67,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	250.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semester SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	140.000.000,-
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000,-
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	25.000.000,-
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	50.000.000,-
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	4 Laporan	30.000.000,-
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Laporan	100.000.000,-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	40.000.000,-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	5.110.000,-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	20 Paket	59.247.000,-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Paket	200.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu	3 Paket	400.000.000,-
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Paket	29.998.000,-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	200 Laporan	200.000.000,-
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 Dokumen	30.000.000,-
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Dokumen	20.000.000,-
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	10 Unit	179.003.836,-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	1 Laporan	2.299.000,-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	316.485.288,-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Laporan	969.393.288,-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	33 Unit	150.000.000,-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Unit	150.000.000,-
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	12 Unit	75.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Unit	3.000.000.000,-
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1 Dokumen	75.000.000,-
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	400.000.000,-
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Orang	400.000.000,-
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240 Lembaga	5.245.000.000,-
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	5 Sertifikat	50.000.000,-
<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>					
<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	50.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	820 Orang	3.508.500.000,-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	200 Orang	150.000.000,-
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	525.000.000,-
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	150.000.000,-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	310.000.000,-
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	75.000.000,-
7	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	1000 Orang	100.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Kabupaten/Kota			
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>					
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	25 Orang	75.000.000,-
2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	75 Orang	200.000.000,-
3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	50 Orang	80.000.000,-
4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	20 Orang	60.000.000,-
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	50 Orang	100.000.000,-
6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	100 Orang	100.000.000,-
7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	2 Dokumen	75.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>					
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	1.000.000.000,-
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175209 Orang	380.000.000,-
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65403 KK	500.000.000,-
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 KK	4.903.800.000,-
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	250.000.000,-
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	600.000.000,-
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Orang	300.000.000,-

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
		Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sasaran/ Volume	Pagu Anggaran (Rp)
		Kabupaten/Kota			
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	100 Unit	200.000.000,-
4	Pelayanan Dukungan Psikosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	50 ORang	150.000.000,-
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	12 Desa/ Kelurahan	750.000.000,-
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	475.000.000,-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>					
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>					
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Dokumen	1.500.000.000,-
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	2 Makam	400.000.000,-

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;
  1. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial.
  2. Optimalisasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
  3. Kecenderungan peningkatan jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  4. Kurangnya sinergi stakeholders dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

- b. Kaidah - kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan PD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Rencana tindak lanjut ;

1. Peningkatan Kualitas Sumber daya aparatur penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
2. Optimalisasi Pemutakhiran DTKS.
3. Sinergitas antar stakeholders.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Akhirnya semoga Dokumen RKT PD tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, Agustus 2024



Pt. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Drs. Yuliandris Suherdiman  
Pembina Tk. 1 (IV/b)  
NIP. 19680708 199403 1 013